

**JURNAL**

Pendidikan Sejarah Indonesia

Online ISSN: 2622-1837

Manajemen pembelajaran berdasarkan sejarah kurikulum di indonesia: sebuah sudut pandang teori belajar

Hasana, Dedi Kuswandib, Zahid Zufar At Thaariqb\*

\*Zahid.zufar.2201218@students.um.ac.id

aUniversitas Tadulako, Jl.Soekarno Hayya No.KM 9, Kota Palu, 94149, Indonesia.

bUniversitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5, Lowokwaru, Kota Malang, 65155, Indonesia.

*Article history:*

Received 12 Novemver 2023; Revised 24 November 2023; Accepted 28 November 2023; Published 24 December 2023

**Abstract:** This study presents a theoretical framework for instructional management in Indonesia, taking into account the historical context of curriculum development and aligning it with the principles of sustainable development goals. Instructional management plays a crucial role in optimizing resources to achieve instructional objectives, and its significance is closely tied to the historical evolution of the curriculum in Indonesia. We examine the instructional management practices employed throughout the history of the curriculum in Indonesia, starting from the Rentjana Pelajaran in 1947 to the implementation of the Merdeka Curriculum since February 2022. By adopting a historical approach, we provide a narrative exploration of instructional management. This article uncovers insights into the theoretical shifts in learning approaches based on the established policies. Furthermore, the curriculum journey in Indonesia has been predominantly influenced by behavioristic learning theory. However, recent curriculum developments have embraced the principles of sustainable development goals. As a result, this article can serve as a valuable reference for teachers seeking guidance on effective instructional management in the classroom.

**Keywords:** Instructional management; Curriculum History; Sustainable Development Goals; Instruction.

**Abstrak:** Studi ini menyajikan kerangka teori untuk manajemen pembelajaran di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks historis pengembangan kurikulum dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan. Manajemen pembelajaran memainkan peran penting dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan signifikansinya terkait erat dengan evolusi historis kurikulum di Indonesia. Kami meneliti praktik manajemen pembelajaran yang digunakan sepanjang sejarah kurikulum di Indonesia, mulai dari Rentjana Pelajaran pada tahun 1947 hingga implementasi Kurikulum Merdeka sejak Februari 2022. Dengan mengadopsi pendekatan historis, kami memberikan eksplorasi naratif tentang manajemen pembelajaran. Artikel ini mengungkap wawasan tentang pergeseran teoritis dalam pendekatan pembelajaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Lebih jauh lagi, perjalanan kurikulum di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh teori pembelajaran behavioristik. Namun, perkembangan kurikulum baru-baru ini telah merangkul prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para guru yang mencari panduan mengenai manajemen pembelajaran yang efektif di kelas.

**Kata kunci:** Manajemen Pembelajaran; Sejarah Kurikulum; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Pembelajaran

PENDAHULUAN

Manajemen pembelajaran dan kurikulum berjalan beriringan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dioptimalkan. Guru harus memiliki pemahaman yang jelas tentang persyaratan kurikulum dan praktik manajemen pembelajaran yang akan mendorong pencapaian siswa. Pengembangan kurikulum yang jelas, ringkas dan komprehensif adalah kunci untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, yang mengarah pada keberhasilan siswa. Manajemen pembelajaran yang efektif sangat penting bagi setiap sekolah untuk mencapai tujuannya. Hal ini mencakup memastikan bahwa para guru menggunakan metode dan teknik mengajar yang tepat yang sesuai dengan kurikulum yang dipilih. Dengan demikian, hasil belajar siswa dapat dioptimalkan. Kurikulum harus dirancang untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut memenuhi tuntutan masyarakat dan berfokus pada kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum sekolah harus diarahkan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan harus relevan di dunia saat ini.

Pembelajaran yang baik adalah proses yang mampu meningkatkan pencapaian kompetensi peserta didik, sesuai dengan rumusan tujuan Pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya (Gunawan, 2017a). Dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, guru harus memperhatikan keselarasan antara materi, media, dan metode yang akan digunakan di dalam kelas. Pembelajaran merupakan inti utama layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa (Gunawan, 2017b).

Para peneliti selama bertahun-tahun telah menyusun sejumlah kerangka kerja untuk menangkap dan menampilkan beragam informasi tentang kepemimpinan dalam pembelajaran dan kepemimpinan yang mendorong peningkatan sekolah. Secara paradoks, terlihat bahwa manajemen pembelajaran ternyata sangat sederhana namun kompleks. Setiap elemen memiliki kedalaman dan nuansa yang berbeda dengan label sederhana. Sebagian besar konsep-konsep tersebut tidak saling terpisah; ada cukup banyak tumpang tindih di antara dan di antara konsep-konsep tersebut. Variabel-variabel saling membungkus satu sama lain dan bercampur menjadi satu. Terkadang, bahan-bahan menjadi sorotan utama. Di lain waktu, mereka berada di belakang panggung. Proporsi yang bervariasi dan bobot yang berbeda berlaku pada waktu dan tempat yang berbeda. Variabel-variabel dapat dikombinasikan dengan berbagai cara untuk mendorong peningkatan sekolah. Hubungan di antara bagian-bagiannya sangat kompleks. Tidak ada alur cerita tunggal. Apa yang kita dapatkan pada akhirnya terlihat seperti rebusan. Pekerjaan ini dalam banyak hal mirip dengan mengurai semak belukar (Murphy *et al.*, 2016)

Sejalan dengan model ini, para peneliti lain mengidentifikasi sejumlah karakteristik pribadi yang relevan dari kepala sekolah, termasuk jenis kelamin, tipe kepribadian, efikasi diri, pengalaman mengajar dan administratif selama bertahun-tahun, pelatihan sebelumnya, dan ras (Hallinger et al., 2016). Demikian juga, Marks & Printy (2003) menemukan bahwa efektivitas sekolah dapat ditingkatkan dengan mengadopsi kepemimpinan Pembelajaran. Robinson et al (2008) berfokus pada poin lain, menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional yang terkait dengan kepemimpinan Pembelajaran dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil dan prestasi siswa. Lee et al (2012) telah merangkum dua kesimpulan utama yang berasal dari semua penelitian sebelumnya tentang konsep tersebut. Pertama adalah bahwa kepemimpinan Pembelajaran mempengaruhi kinerja organisasi pembelajaran dengan cara yang positif. Kedua adalah bahwa kepemimpinan Pembelajaran adalah struktur multifaset yang menyesuaikan diri dengan cara yang berbeda tergantung pada konteksnya, yang sangat penting untuk penelitian ini (Antoniou & Lu, 2018).

Dengan demikian, kami akan mengkaji manajemen pembelajaran dari sudut pandang historis di Indonesia. Kajian tentang manajemen pembelajaran dalam perspektif historis mengungkapkan bagaimana para pemimpin pendidikan telah menggunakan model, kerangka kerja, dan strategi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perspektif historis tentang manajemen pembelajaran telah secara signifikan mempengaruhi pembelajaran di ruang kelas kontemporer. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan sejarah di dalamnya. Misalnya dalam penelitian Tolvanen et al (2013) bahwa keberhasilan implementasi pendekatan historis untuk mengajarkan ilmu pengetahuan alam membutuhkan materi kurikulum yang sesuai. Untuk mendukung diskusi kelas secara eksplisit mengenai isu-isu hakikat sains yang dipilih, narasi sejarah yang digunakan dalam RPP harus mengilustrasikan isu-isu tersebut. RPP juga harus menyertakan instruksi tentang bagaimana memfasilitasi diskusi kelas, seperti pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dan direfleksikan oleh siswa. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Lederman et al (2013) bahwa menelaah filosofi, sejarah, dan sosiologi ilmu pengetahuan itu sendiri memiliki potensi untuk memunculkan persepsi ilmu pengetahuan, dalam konteks yang lebih luas, yang dapat berdampak pada lensa yang digunakan siswa untuk memandang dunia.

Meskipun perspektif perilaku dan manajerial masih memiliki beberapa relevansi, sistem pendidikan sebagian besar menggunakan pendekatan perspektif sistem pembelajaran untuk mempromosikan pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, manajemen pembelajaran tetap menjadi aspek penting dalam pendidikan, dan guru harus terus mencari strategi dan teknik baru yang sesuai dengan perubahan lanskap pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mempertahankan bahasa yang konsisten dan frasa ekspektasi yang umum dan luas akan meningkatkan kemampuan generalisasi di seluruh pengaturan, baik tradisional maupun jarak jauh (Hirsch et al., 2021).

METODE

Kami menggunakan pendekatan penelitian sejarah dalam mengkonstruksi bahasan-bahasan dalam artikel ini yang dijelaskan secara naratif. Bahan-bahan yang dicari berkaitan dengan kurikulum yang berkembang di Indonesia menggunakan referensi-referensi terdahulu, yakni (1) Rentjana Peladjaran 1947, (2) Rentjana Peladjaran Terurai 1952, (3) Rentjana Pendidikan 1964, (4) Kurikulum 1968 (Rentjana Pendidikan dan Pembeladjaran Gaja Baru), (5) Kurikulum 1975, (6) Kurikulum 1984, (7) Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999, (8) Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK) 2004, (9) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, (10) Kurikulum 2013 dan (11) Kurikulum Merdeka (Alhamuddin, 2019). Fokus yang dicari adalah manajemen pembelajaran dalam sisi terapan teori belajar yang digunakan. Pada akhirnya, kita akan menemukan bentuk teori pembelajaran dari tiap kurikulum yang berkembang di Indonesia.

**Gambar 1**. Tahap Kajian Penelitian.

(sumber: *dokumentasi pribadi peneliti, 2023*)

Langkah-langkah dalam melakukan kajian ini meliputi (1) pemilihan topik; (2) heuristik; (3) verifikasi; (4) interpretasi dan (5) historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pertama, langkah pertama yang harus dilakukan dalam perjalanan kajian ini adalah memilih topik yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap topik penelitian yang menarik dan relevan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam artikel ini, kajian tentang manajemen pembelajaran melalui lensa sejarah merupakan bidang kajian yang relatif baru dan belum banyak dieksplorasi. Inilah alasan di balik pemilihan topik ini. Selain itu, penggunaan metodologi historis juga memberikan dimensi baru dalam mengkaji manajemen pendidikan di Indonesia. Dengan melakukan langkah pertama ini, peneliti dapat memberikan arah pada kajian dengan memfokuskan area kajian pada bidang yang spesifik dan jelas.

Langkah berikutnya dalam penelitian adalah tahap heuristik, di mana peneliti mengumpulkan data terkait topik penelitian melalui analisis dokumen. Dalam kajian ini, kami menggunakan sumber primer berupa dokumen Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka (Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013; Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2021), sedangkan untuk perkembangan kurikulum sebelumnya kami menggunakan gabungan sumber-sumber primer dengan sekunder berupa terbitan-terbitan terdahulu yang ada dan diterbitkan oleh peneliti/penulis pendidikan sebagai referensi pendukung maupun Kemdikbud itu sendiri sebagai referensi utama (Misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996; Depdiknas, 2001; Harahap, 1979; Karwapi, 1971; Surachmad, 1977). Hasil dari tahap heuristik ini dapat menjadi dasar informasi yang akan digunakan pada tahap-tahap berikutnya.

Setelah data terkumpul, penelitian akan melanjutkan ke tahap verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap keakuratan dan keandalan data yang telah terkumpul. Proses ini melibatkan pemeriksaan sumber data serta validitas metodologi penelitian yang telah digunakan. Selama proses verifikasi, peneliti memeriksa terkait informasi yang diberikan oleh sumber tersebut konsisten dengan teori-teori atau penelitian lain yang relevan. Keterkaitan dan konsistensi ini dapat menjadi indikator keabsahan informasi. Jika informasi dari sumber tersebut sesuai dengan temuan dari sumber lain, itu dapat memperkuat keandalan data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian sebagaimana yang dijelaskan pada tahap heuristik, peneliti berusaha untuk merujuk pada sumber-sumber ini untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan.

Fokus selanjutnya adalah pada tahap interpretasi. Setelah data diverifikasi, peneliti akan melakukan interpretasi hasil penelitian secara kritis. Interpretasi data-data yang peneliti peroleh didasarkan pada teori-teori belajar yang relevan. Peneliti mengkaji bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia dapat dijelaskan melalui lensa teori-teori belajar tertentu. Analisis ini tidak hanya didasarkan pada pendekatan analisis pribadi, tetapi juga menggunakan teori-teori yang diakui dalam bidang belajar dan pembelajaran. Hasil dari tahap ini akan disajikan secara logis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan topik penelitian.

Pada akhirnya, studi ini mencapai tahap historiografi. Pada tahap ini, para peneliti menempatkan temuan penelitian ke dalam konteks sejarah atau konteks yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan mengkaji literatur dan penelitian sebelumnya guna mengevaluasi dampak penelitian terhadap pemahaman umum dalam bidang tersebut. Peneliti merangkai data-data sejarah ini dengan pendekatan yang bersifat kronologis, memaparkan perkembangan kurikulum berdasarkan urutan waktu. Di samping itu, peneliti juga menggunakan pendekatan tematis jika terdapat pola atau tema tertentu yang signifikan dalam perkembangan kurikulum. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menghadirkan fakta sejarah secara kronologis tetapi juga membangun konstruksi sejarah dengan mengidentifikasi dan menyoroti tema-tema penting yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran di Indonesia.

Dengan melalui serangkaian langkah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan dalam pemahaman dalam bidang studi yang dipilih dengan memastikan pemilihan topik yang relevan, pengumpulan data yang teliti, verifikasi yang cermat, interpretasi yang mendalam, dan penempatan hasil penelitian dalam konteks yang sesuai. Pendekatan ini membentuk dasar yang kuat untuk pengembangan pemikiran dan kontribusi pengetahuan dalam ranah penelitian pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan kurikulum di Indonesia telah menjadi topik diskusi selama bertahun-tahun, karena kurikulum yang ada telah dikritik karena ketinggalan zaman dan tidak memenuhi kebutuhan siswa di negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan upaya untuk memperbaiki kurikulum dengan memperkenalkan mata pelajaran baru dan berfokus pada pendekatan yang lebih praktis dalam pendidikan. Salah satu inisiatif tersebut adalah Kurikulum Nasional 2013, yang bertujuan untuk memberikan siswa lebih banyak pengalaman langsung dan mempromosikan keterampilan berpikir kritis.

Kurikulum sebagai sebuah program yang terencana memiliki cakupan yang luas dalam membentuk sebuah pandangan yang komprehensif. Sehingga di satu sisi kurikulum dapat diartikan sebagai dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas yang harus dimiliki melalui sebuah pengalaman belajar, namun dapat dilihat sebagai program terencana dan komprehensif yang menggambarkan kualitas suatu bangsa (Hidayat et al., 2017). Kurikulum selalu ada perubahan dan penyempurnaan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dari negara dijajah menjadi negara merdeka (Nasution, 1999). Opini masyarakat “ganti menteri ganti kurikulum” namun kenyataanya bukan seperti itu. Kenyataraanya perubahan kurikulum adalah bentuk sebagai pengaruh dari perubahan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, misalnya seperti Rencana Pelajaran 1952 merupakan konsekuensi lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1950 dan kurikulum 1994 merupakan konsekuensi dari lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989 (Suparlan, 2020).

Dengan demikian, perubahan kurikulum ini terjadi seiringan dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman dimana kurikulum itu diterapkan (Ananda & Hudaidah, 2021). Perbaikan kurikulum sekurang-kurangnya dilaksanakan sekitar sepuluh tahun sekali. Karena dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, sangat mungkin terjadi perubahan dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi komunikasi dan ilmu pengetahuan (Insani, 2019). Melalui artikel ini, kami akan membahas perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia.

**Gambar 2.**Perkembangan Kurikulum di Indonesia secara Kronologis.

(sumber: *dokumentasi pribadi peneliti, 2023*)

Rentjana Peladjaran 1947

Pada awal kemerdekaan, istilah kurikulum dikenal dengan “*Leer Plan*” dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran (karena saat itu istilah kurikulum belum dikenal). Dalam kurikulum ini terdapat dua hal pokok yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajaran dan yang kedua garis-garis besar pengajaran. Pada masa ini, kurikulum masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan kurikulum yang pernah digunakan sebelumnya (Wahyudin, 2020). Meski begitu, Rentjana pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial sebelumnya secara radikal (Wahyudin & Suwirta, 2017) dan kurikulum ini tujuannya tidak menekankan pada pikiran (kecerdasan), tetapi lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat (Iramdan & Manurung, 2019). yang meliputi (1) kesadaran bernegara dan bermasyarakat, (2) materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan (3) perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani (Agung & Noviastuti, 2015).

Menurut Sjamsuddin (1993) kehadiran Rentjana Peladjaran 1947 didasari melalui Surat Keputusan No. 104/Bhg.0/1946 terkait pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dimana panitia ini merumuskan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

1. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Perasaan cinta kepada alam

3. Perasaan cinta kepada negara

4. Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak

5. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan

6. Perasaan berhak dan wajib memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya.

7. Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat.

8. Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib

9. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri.

10. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban dan jujur dalam pikiran dan tindakan.

Secara umum, anatomi kurikulum ini memuat 3 kolom penting, yakni (1) nama kelas/mata pelajaran; (2) jumlah jam pelajaran per minggu; dan (3) bahan/materi pengajaran (S. Wahyuni, 2003). Mata Pelajaran pada kurikulum tahun 1947 untuk tingkat Sekolah Rakyat (SR) ada 16 bidang studi, Sekolah Menengah (SMP) ada 17 bidang studi, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan B ada 19 bidang studi (Abdullah, 2007). Terkait penerapannya, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Pertama, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedua, jumlah mata pelajaran untuk Sekolah Rakyat (SR) 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi, SMA jurusan B 19 bidang studi. Ketiga, Lahirnya Rencana Pelajaran 1947 diawali dari pembenahan sistem per sekolahan pascaIndonesia merdeka yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Agung & Noviastuti, 2015).

**Rentjana Peladjaran Terurai 1952**

"Rentjana Peladjaran Terurai 1952" adalah dokumen pendidikan yang sangat penting yang menangkap visi dan perencanaan pemerintah Indonesia untuk sistem pendidikan di era pasca-kemerdekaan. Ini adalah kerangka kerja kebijakan yang komprehensif yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan budaya negara dan bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua warganya. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembangunan bangsa dan menekankan kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin, penduduk pedesaan dan perkotaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 memuat dasar-dasar fondasi pendidikan di sekolah yang dibuat untuk menentukan ketentuan pendidikan Indonesia mengenai kurikulum, guru, sekolah, biaya sekolah, pengawasan, liburan sekolah, dan hubungan antara sekolah dan orang tua murid. Pasal-pasal dalam undang-undang ini juga mencakup tujuan pendidikan Indonesia, dan beberapa mata pelajaran tercantum, yaitu pengajaran agama, pendidikan jasmani, dan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Secara singkat, tujuan yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut adalah untuk menghasilkan warga negara yang bijaksana, demokratis, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Mukminin et al., 2019). Oleh karena itu Rentjana Peladjaran 1952 mulai menguraikan apa yang belum ada di kurikulum sebelumnya menjadi suatu sistem pendidikan nasional (Wahyuni, 2015).

Rentjana Peladjaran 1952 mengarah pada kurikulum sistem pendidikan nasional di mana setiap rencana pelajaran harus mempertimbangkan konten mata pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini diuraikan dalam lima kolom, seperti kelas, Jumlah Jam Pelajaran per minggu, Topik, Pelajaran dan keterangan (Wahyuni, 2015). Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran (Raharjo, 2020).

**Rentjana Peladjaran dan Pendidikan 1964**

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Peladjaran dan Pendidikan 1964. Kurikulum ini diawali dari adanya Dekrit Presiden RI 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Dekrit ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Mudia Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono, yang mengeluarkan instruksi yang dikenal sebagai “*Sapta Usaha Tama*”. Dalam bagian itu disebutkan bahwa dengan adanya Dekrit Presiden dan kembalinya UUD 1945, maka “*kaum pendidik dan para peladjarnja wadjib memiliki kembali semangat dan djiwa proklamasi untuk dapat memberi tjontoh kepada seluruh masjarakat*”. Dengan demikian proses pendidikan pada masa ini cenderung bersifat politis, bukan pedagogis dan tidak ada bukti empiris yang mendukung klaim bahwa generasi muda telah kehilangan semangat dan jiwa proklamasi (Wahyudin, 2020)

Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2000), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/ artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis (Alhamuddin, 2014).

Rentjana Pendidikan 1964 adalah kebijakan penting yang memiliki dampak besar pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali masyarakat Indonesia dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang makmur dan adil. Kurikulum ini berfokus pada pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses pendidikan dan menekankan peran pendidikan dalam pembangunan nasional dan masyarakat. Perancangan dan pengembangan kurikulum ini adalah untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya, kurikulum yang membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan Pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan memberikan bekal akademik dan non-akademik untuk tingkat pendidikan sekolah dasar (Priantini et al., 2022).

**Kurikulum 1968**

Kurikulum 1968 (juga dikenal sebagai Rentjana Pendidikan dan Pembeladjaran Gaja Baru) merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sejak inilah istilah rencana pelajaran yang sudah digunakan selama bertahun-tahun berganti menjadi kurikulum (Kosassy, 2017).

Kurikulum 1968 dilahirkan oleh pemerintah dengan harapan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan karena kurikulum yang berlangsung sebelumnya terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengkomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa UUD 1945. Dalam penerapannya, kurikulum 1968 diserahkan pada masing-masing sekolah atau guru, kurikulum 1968 secara nasional hanya memuat tujuan materi, metodik dan evaluasi. Hal ini berarti kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi (Asri, 2017).

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat (Wahyuni, 2015)

Kurikulum 1968 dapat dikategorikan sebagai correlated subject curriculum. Artinya, kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar lain (Suparlan, 2020). Hal ini supaya mendapat perhatian sepenuhnya dari pengajar mata pelajaran pokok dan pula dari pengajar mata pelajaran yang ada sangkut pautnya. Pada para pelajar dengan demikian dapat ditanamkan pengertian adanya secara nyata hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain (Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan, 1968). Selain itu, salah satu semangat yang dikembangkan yaitu nation building dalam proses pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari dilarangnya seluruh sekolah asing masuk ke dalam negeri. Sementara itu, lembaga pendidikan melakukan penyederhanaan, baik jumlah maupun struktur (Izmi, 2017).

**Kurikulum 1975**

Pada masa Pembangunan Lima Tahun tahap kedua (Pelita Kedua), kurikulum tahun 1968 yang telah diterapkan di berbagai sekolah dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa fenomena, seperti adanya pembaharuan pendidikan selama Pelita I yang dimulai pada tahun 1969, yang melahirkan gagasan-gagasan baru dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Selain itu, hasil analisis dan penilaian juga mendorong peninjauan kembali terhadap kebijaksanaan pendidikan nasional, serta masuknya berbagai kebaruan-kebaruan dalam sistem belajar mengajar yang dinilai lebih efisien dan efektif. Keluhan masyarakat terhadap mutu lulusan pendidikan sekolah juga menjadi faktor penting dalam peninjauan kembali sistem pendidikan yang dilaksanakan. Selain fenomena tersebut, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR1973 tentang GBHN juga menuntut adanya pelaksanaan. Dalam GBHN tersebut dinyatakan bahwa dasar pendidikan nasional adalah Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan umum pendidikan nasional adalah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang –Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, seluruh program pendidikan, terutama program pendidikan umum, harus berisikan pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai.

Kurikulum 1975 merupakan pengganti dari kurikulum 1968. Pada kurikulum sebelumnya belum memperhitungkan hal-hal yang mengenai faktor kebijaksanaan pemeritah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional. Kurikulum 1975 dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan dibawah pemerintahan orde baru dengan program PELITA dan REPELITA (Ananda & Hudaidah, 2021). Menurut Tilaar (1995) pada masa Orde Baru, pendidikan diarahkan untuk mencapai keseragaman dalam berpikir dan bertindak. Penerapan pendidikan tersebut tidak bertujuan untuk meningkatkan kualitas, tetapi lebih fokus pada target kuantitas. Kurangnya perhatian pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan dapat dilihat pada awal tahun 1980-an ketika terjadi krisis minyak yang mengganggu stabilitas ekonomi. Sebagai respons, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Sikap pemerintah Orde Baru ini juga menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan ditempatkan di bawah kendali birokrasi negara (Sadirman & Yuliantri, 2012).

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO *(management by objective*) yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan Pembelajaran khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi (Wahyuni, 2015). Di dalam kurikulum 1975, pada setiap bidang studi dicantumkan tujuan kurikulum, sedangkan pada setiap pokok bahasan diberikan tujuan pembelajaran umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai satuan bahasan yang memiliki tujuan pembelajaran khusus. Dalam proses pembelajaran, guru harus berusaha agar tujuan pembelajaran khusus dapat dicapai oleh peserta didik, setelah mata pelajaran atau pokok bahasan tertentu disajikan oleh guru (Wirianto, 2014). Dengan demikian, kurikulum 1975 banyak dikritik karena guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran (Wahyuni, 2015)

Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur yang didasarkan pada teori pengembangan kurikulum. Meskipun demikian, kurikulum ini masih dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis pendidikan keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi kepada pembangunan. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (*drill*) (Muhammedi, 2016). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, yaitu sekolah dan guru (Hamalik, 1995).

**Kurikulum 1984**

Kurikulum 1975 hingga tahun 1983 dianggap sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran Humanistik, yang memandang siswa sebagai individu yang dapat dan mau secara aktif mencari sendiri, menjelajahi dan meneliti lingkungannya. Dalam kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, karena mengedepankan pendekatan keterampilan proses. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, faktor tujuan merupakan hal yang penting (Abidin et al., 2023).

Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 1984 adalah prinsip dekonsentrasi yang mempunyai arti adanya pembagian kewenangan dalam pengembangan kurikulum antara pusat dan daerah, kewenangan daerah dalam hal ini terutama terletak pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat dan lapangan kerja di daerah (Soedjiarto et al., 2010). Secara umum, isi dari kurikulum 1984 mengarah pada orientasi pelajaran yang menekankan mengarah pada orientasi pelajaran yang menekankan pada keseimbangan antara kognitif, keterampilan, sikap, antara teori dan praktik, menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Kualifikasi lulusan lebih jelas dan terarah pada lapangan pekerjaan tertentu. Mengandung unsur peningkatan aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Wardhana, 2021).

Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). Oleh sebab itu kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses, disamping tetap menggunakan orientasi pada tujuan. Kurikulum 1984 mengusung process *skill approach* (Jannah & Laili, 2018). Konsep CBSA secara teoritis serta bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang telah diuji cobakan, yang mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA, sebagai sesuatu suasana gaduh di ruangan kelas lantaran peserta didik berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, serta yang menyolok pendidik tidak lagi mengajar motode ceramah sehingga penolakan CBSA bermunculan (Wardhana, 2021).

**Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999**

Kurikulum 1994 lahir dengan menggabungkan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun sayangnya tujuan dan prosesnya tidak berhasil digabungkan. Ada banyak kritik terhadap hal ini karena dirasa beban belajar siswa terlalu tinggi, mulai dari muatan nasional hingga daerah. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan setempat, antara lain bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan sebagainya. Berbagai aktor sosial juga menuntut agar mata pelajaran tertentu dimasukkan ke dalam kurikulum. Kurikulum kemudian diubah menjadi kurikulum yang lebih padat (1994). Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti oleh kehadiran Suplemen Kurikulum 1999 (Wahyudin, 2020). Namun, perubahan ini cenderung tidak menyelesaikan banyak masalah. Hal ini dikarenakan perubahannya hanya sebatas menambal sejumlah materi pelajaran saja (Alhamuddin, 2014).

Kurikulum 1994 mempunyai karakteristik utama yakni (1) pengembangan bentuk dokumen naratif, (2) isi kurikulum terdiri atas 80% muatan inti dan 20% muatan lokal (muatan nasional dan daerah), (3) mengalami pemangkasan materi *overlooping*, (4) diadakan suplemen 1999 sebagai penguatan dari materi yang terpangkas, (5) pendekatan keterampilan proses dan (6) bersifat Sentralistik dan sedikit desentralistik (Nurhalim, 2011). Dengan demikian, pada dasarnya kurikulum ini merupakan *content based*, yang berbeda dengan kurikulum yang berbasis kompetensi yang akan diterapkan pada tahun 2004.

Menurut sejumlah pengamat pendidikan, Kurikulum 1994 dinilai kurang berhasil karena hanya berorientasi pada materi. Posisi sentral dipegang oleh birokrasi pendidikan yang menentukan kualitas lulusan sekolah, dan dalam proses pembelajaran peran guru lebih dominan dari pada siswa (Mulyanie & Susilowati, 2006). Selama ini Kurikulum 1994 dengan Suplemen 1999 kurang relevan dengan realita kehidupan dan kurang mempersiapkan peserta didik di zaman globalisasi yang ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wardana, 2003). Menurut Asman (2003)tuntutan perubahan kurikulum dirasakan sebagai hal yang mendesak dengan alasan, yakni (1) kurikulum 1994 dipandang oleh pemerintah dan para ahli pendidikan gagal membentuk manusia Indonesia yang cerdas, mandiri, kreatif, dan inovatif dan (2) pemerintah berusaha melihat kebutuhan ke depan yang mendesak, menatap perubahan jaman akibat ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perubahan tatanan manusia di dunia.

**Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004**

Perubahan Kurikulum 1994 menjadi KBK akan membawa konsekuensi pada perubahan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas (Depdiknas, 2003). Salah satu konsekuensinya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas difokuskan pada pengembangan kompetensi setiap individu siswa. Artinya setiap siswa akan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan latihan mengembangkan kompetensi di setiap mata pelajaran, sehingga kompetensi itu dikuasai dan menjadi kebiasaan berpikir dan bertindak yang dilakukan secara konsisten. Dengan penekanan proses pembelajaran kepada pengembangan kompetensi setiap individu siswa, sebaiknya penerapan KBK menggunakan modul sebagai sistem pembelajaran. Dalam hal ini modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan serta dirancang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar yaitu menguasai kompetensi yang telah ditetapkan (Budiono & Susanto, 2006).

Penekanan dari kurikulum ini adalah kompetensi. Implikasinya, akan terjadi pergeseran dari penguasaan pengetahuan (kognitif) atau dominasi kognitif menuju kepada penguasaan kompetensi tertentu. Kompetensi yang dituntut dibagi atas tiga macam, yaitu: 1) Kompetensi tamatan/lulusan; kompetensi minimal yang harus dicapai siswa yang tamat dari suatu jenjang pendidikan tertentu (SD–SLTA); 2) Kompetensi Umum Mata Pelajaran/Standar; kompetensi/baku kinerja minimal yang harus dicapai pada saat siswa menyelesaikan suatu rumpun atau mata pelajaran tertentu; serta 3) Kompetensi dasar; kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam penguasaan konsep/materi yang dibelajarkan (ukuran minimal yang telah ditetapkan tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku dasar dalam menguasai materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar) (Kwartolo, 1994).

Dari penjelasan ini, ada dua hal pokok yang menjadi ciri KBK. Pertama, sistem penilaian secara keseluruhan tetap mendasarkan pada kegiatan belajar di kelas (berbasis kelas) meskipun dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi tersirat adanya pengajaran individual karena setiap individu harus menguasai kompetensi-kompetensi tertentu yang sudah ditetapkan. Kedua, adanya identifikasi kompetensi sebagai kriteria hasil belajar yang harus dan telah dicapai oleh siswa. Pertanyaan yang timbul adalah menyangkut cara melakukan evaluasi yang tepat agar hasil evaluasi terhadap seseorang siswa betul-betul menunjukkan kompetensi yang dapat dimiliki yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut (E. Purnomo & Munadi, 2015).

**Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum Tingkat Satuan pendidikaan atau di singkat KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan diharapkan memiliki tangung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif (Pawero, 2018).

Keberadaan KTSP ini apabila dicermati dan direnungkan dari dimensi paradigma pembelajaran, maka sejatinya visi dan misi yang diusung dalam KTSP adalah mengharapkan adanya perubahan paradigma pembelajaran di semua satuan pendidikan dari paradigma *normal child and exceptional child* menjadi *regular child and special educational needs*; dari paradigma *teacher centered* menuju *child centered*; dari paradigma *subject method curriculum* menuju *competence base curriculum*; dan dari paradigma *exclusive segregative educational* menuju *inclusive education process.* Apabila mencermati paradigma pembelajaran dan sistem evaluasi yang dikembangkan dalam KTSP, maka motode yang dapat digunakan oleh guru sebagai agen perubahan (agent of change) dalam mendorong terjadinya perubahan kualitas pembelajaran siswa di kelas adalah metode pertama (metode rasional–empiris) dipadukan dengan metode kedua (metode normatif–edukatif) (Arifin, 2009).

Intisari dari KTSP adalah (1) materi disusun untuk memberi pengetahuan kepada siswa, (2) pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dikuasai (siswa diberitahu) dan (3) penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian (Hakim, 2017). Maka dalam kurikulum ini, setiap guru harus punya komitmen yang kokoh untuk terus meningkatkan kualitas kompetensi profesi atau akademiknya (Arifin, 2009)

**Kurikulum 2013**

Kurikulum 2013 telah menjadi isu yang diangkat oleh para guru dan siswa. Kurikulum ini didasarkan pada kompetensi yang berkaitan dengan penerapan empat aspek yaitu spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai pembentukan karakter siswa (Ekawati, 2017). Pada kurikulum KBK 2004 dan KTSP 2006 dijelaskan bahwa standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang di dalamnya merupakan paparan standar kompetensi lulusan mata pelajaran dirinci menjadi standar kompetensi dasar mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang tidak terikat pada mata pelajaran. Pola pikir lainnya dalam kurikulum 2013 memandang bahwa semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan aspek afektif, aspek psikomotorik, dan aspek kognitif pada peserta didik. Padahal pada kurikulum sebelumnya jelas sekali terlihat adanya pemisahan mata pelajaran untuk membentuk aspek afektif, membentuk aspek psikomotorik, dan pembentukan aspek kognitif. Kurikulum 2013 menurunkan mata pelajaran dari kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik, sementara kurikulum 2004 dan KTSP 2006 menurunkan kompetensi dari mata pelajaran (Sinambela, 2013)

Dalam hal ini kita dapat melihat pengertian eklektik dari model ini dari berbagai sisi, misalnya model ini menekankan pada hasil atau kompetensi siswa sebagai pusat dari proses pengembangan untuk menetapkan tujuan, proses, dan penilaian pembelajaran, tetapi di sisi lain kita juga dapat melihat bahwa model ini juga menekankan pada konteks sosial-budaya sebagai pertimbangan penting dalam mengembangkan desain kurikulum di tingkat sekolah. Artinya, kurikulum nasional 2013 tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kurikulum sebagai produk saja, kurikulum sebagai praksis mungkin lebih tepat karena model pengembangannya juga menekankan tujuan dan proses pembelajaran sebagai faktor penting seperti yang telah dituliskan secara resmi dalam dokumennya (Palupi, 2018). Sebagai tenaga pengajar yang paling berperan, pengajar haruslah seseorang yang dapat mengaplikasikan empat kompetensi pengajar secara spesifik, yaitu akademik, profesional, sosial, dan individual. Tugas pengajar di dalam sistem pembelajaran terlihat dari porsinya sebagai pihak yang harus memilah atau mengawasi komponen-komponen kurikulum, sistem penyajian materi pelajaran, sistem pengorganisasian, dan sistem penilaian (Warman et al., 2021)Kegiatan belajar akan lebih bermakna jika dipersiapkan dengan baik oleh guru. Guru juga harus mempertimbangkan Kurikulum 2013 yang berlaku saat mengembangkan kegiatan pembelajaran (Gunawan, 2017a).

Kurikulum dirancang untuk memberikan panduan dalam mengelola kurikulum sekolah dan pembelajaran yang akan dilakukan oleh sekolah (Gunawan, 2017b). Sekolah harus menerapkan manajemen kurikulum, karena kurikulum merupakan acuan dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum membutuhkan manajemen untuk menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Prastyo, 2013). Guru harus siap dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar, karena guru memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mendukung proses kurikulum ketika diimplementasikan. Menurut Chairani (2015) fokus dari kurikulum ini adalah (1) memberdayakan implementasi kurikulum berbasis kompetensi dalam proses pembelajaran; (2) memberdayakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik dalam proses pembelajaran; (3) memberdayakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dari "peserta didik diberitahu" menjadi "peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber"; dan (4) memberdayakan asesmen proses dan hasil.

**Kurikulum Merdeka**

Melihat kesulitan yang dialami oleh para guru ketika menerapkan kurikulum 2013, pemerintah membuat terobosan baru yaitu Kurikulum 2013 akan diganti atau dimaksimalkan lagi menjadi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep transformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan proses pendidikan yang lebih baik (Lestari, 2023). Implementasi kebijakan ini mengubah paradigma pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis hasil belajar yang adaptif dan fleksibel untuk mempersiapkan siswa menjadi orang dewasa yang dapat mandiri (Restu et al., 2022).

Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum alternatif mengatasi kemunduran pembelajaran pada masa pandemi yang memberikan kebebasan "*Freedom to Learn*" kepada pelaksana pembelajaran, yaitu guru dan kepala sekolah dalam menyusun, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengembangkan kurikulum di sekolah dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi peserta didik (Angga et al., 2022). Kurikulum Merdeka menjadi pilihan bagi sekolah yang siap mengimplementasikannya dalam rangka pemulihan pembelajaran dari tahun 2022 hingga 2024 akibat pandemi (Vivekanantharasa et al., 2022). Proses sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemberlakuan Kurikulum Merdeka sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi pembelajaran di Indonesia, terutama setelah melalui pandemi COVID-19 (Rizaldi & Fatimah, 2022).

Kurikulum Merdeka merupakan implementasi kurikulum pasca pandemi dan akan diterapkan secara penuh di lembaga pendidikan secara terbatas di beberapa sekolah. Persiapan guru dalam menghadapi kurikulum ini adalah dengan mempersiapkan wawasan dan informasi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dengan mengikuti beberapa pelatihan dan *workshop* yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun swasta (Hadi et al., 2023). Guru memberikan respon yang antusias dalam mengimplementasikan kurikulum ini karena salah satu prinsip fleksibilitas yang memberikan ruang bagi guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan berpihak pada siswa (Fitriyah & Wardani, 2022). Artinya, dalam perspektif pembelajaran melalui kurikulum merdeka menjadi dasar yang kuat untuk menggerakkan komponen-komponen pembelajaran secara terintegrasi dan bermakna dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya secara global (Suryaman, 2020).

**Relevansi Teori Belajar: Kajian dari Perkembangan Kurikulum di Indonesia**

Terdapat relevansi yang signifikan antara teori belajar dengan pengembangan dan implementasi kurikulum. Teori belajar memberikan kerangka kerja tentang bagaimana manusia belajar dan menyimpan informasi, yang sangat penting bagi pendidik untuk mengembangkan strategi pengajaran yang efektif. Sebagai contoh, ada teori belajar behaviorisme, yang berpendapat bahwa perilaku dipelajari melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan lingkungan. Dengan kata lain, kaum behavioris percaya bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perilaku individu, dan penguatan positif atau negatif dapat digunakan untuk membentuk perilaku individu. Pendidik dapat mengintegrasikan teori ini ke dalam kurikulum untuk mengembangkan strategi Pembelajaran yang efektif yang mempromosikan perilaku belajar yang positif. Dengan memahami relevansi teori belajar, pendidik dapat menyesuaikan instruksi mereka dan memberikan pengalaman belajar yang berbeda yang mendorong keterlibatan, retensi, dan transfer pengetahuan yang lebih tinggi.

Setelah kita mengetahui perjalanan historis dari manajemen kurikulum di Indonesia, maka bisa disimpulkan mengenai teori belajar yang digunakan. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami kompleksitas yang melekat pada proses belajar (Muhajirah, 2020). Kami berfokus pada teori-teori belajar seperti (1) behaviorisme (Pavlov, 1932; Skinner, 1957; Thorndike, 1911; Watson, 1913), (2) humanisme (Maslow, 2013), (3) kognitivisme (Bandura, 2001; Kohler, 1960, 2018), (4) konstruktivisme (Piaget, 1988; Vygotsky, 1978) dan (5) konektivisme (Siemens, 2017).

Behaviorisme dapat dilihat sebagai sebuah spesies merupakan sebuah bidang praktik adalah ceruk, para profesional lain di bidang yang sama adalah kompetitor, dan konsekuensi penguat dari perilaku mereka dalam komunitas verbal mereka adalah sumber daya (Araiba, 2020). Sebagai contoh, behaviorisme radikal adalah spesies, psikologi eksperimental (beserta jurnal dan akademisinya) adalah ceruk, psikologi kognitif, psikologi sosial, dan neuropsikologi adalah kompetitor, dan sumber dayanya adalah imbalan finansial, reputasi, imbalan karier, interaksi sosial, penemuan ilmiah, dan pengetahuan. Selama tahun-tahun ketika ide-ide behaviorisme dikembangkan, mereka selaras dengan posisi filosofis positivisme logis yang diperjuangkan dalam fisika dan di tempat lain. Konsep harus didefinisikan oleh operasi yang digunakan untuk mengukurnya, untuk menjaga agar ilmu pengetahuan tetap berpijak pada data yang dapat diamati dan untuk menghilangkan khayalan spekulatif (Ziafar & Namaziandost, 2019).

Humanisme adalah aliran kemanusiaan. Humanisme adalah pendekatan psikologis, yang menekankan pada masalah manusia, minat, nilai, dan martabat manusia (Muhajirah, 2020). Teori belajar humanistik didasarkan pada filosofi teori psikologi humanistik, termasuk teori yang berpusat pada orang (Gould, 2012). Pandangan tentang mengetahui ini membutuhkan perubahan paradigma bagi orang yang cenderung menggambarkan pembelajaran sebagai akuisisi dan penerapan pengetahuan. Secara khusus, peserta didik yang telah belajar untuk mendekati tugas atau kelas dengan mentalitas berbasis nilai kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mengubah, atau bahkan memahami alasan untuk mengubah, fokus mereka menjadi mentalitas berbasis pembelajaran (Purswell, 2019). Humanistik dalam pendidikan melibatkan pembentukan nilai-nilai "manusiawi" siswa, kemampuan guru untuk memahami siswa, perhatian guru terhadap perasaan dan emosi siswa, keterlibatan siswa dalam proses memperoleh pengetahuan (Tolstova & Levasheva, 2019). Humanis melibatkan, pertama, siswa saling membantu, kreasi bersama antara mereka sendiri dan dengan guru, pembentukan apa yang disebut "keterampilan lunak" siswa, yaitu pembentukan keterampilan untuk membangun hubungan antarmanusia, kemampuan untuk terlibat dalam dialog, berinteraksi, bekerja dalam tim, dan membuat proyek kolektif "gambar masa depan" dan pengembangan kemampuan kreatif. Kedua, berkontribusi pada pembentukan kompetensi universal siswa, seperti, kerja tim dan kepemimpinan, komunikasi, interaksi antarbudaya, pengorganisasian diri dan pengembangan diri menyiratkan terciptanya kondisi untuk peran aktif siswa dengan mempertimbangkan minat mereka. Kepribadian siswa ditempatkan di tengah-tengah proses pengajaran (Abramova, 2019).

Teori belajar kognitif mencakup berbagai macam ide dari hasil karya banyak peneliti. Ini adalah bidang yang terus berkembang yang telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan di berbagai bidang termasuk desain Pembelajaran, psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dan semakin banyak neuropsikologi kognitif. Teori-teori belajar kognitif berfokus pada kemampuan siswa untuk memandu pembelajaran mereka sendiri dengan menggunakan strategi mental (Michela, 2022). Ini mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental sejauh yang berkaitan dengan cara berpikir manusia dalam memperoleh pengetahuan, mengolah kesan-kesan yang masuk melalui pancaindera, memecahkan masalah, menggali ingatan tentang keahlian dan prosedur kerja yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan mental meliputi gejala-gejala kognitif, afektif, konatif sampai pada tingkat tertentu yaitu psikosomatik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Muhajirah, 2020).

Konstruktivisme merupakan pengembangan dari teori belajar kognitif. Kostruktivisme berangkat dari keyakinan bahwa pengetahuan merupakan proses pembentukan yang terus berkembang dan berubah. Pendidikan selalu merupakan hasil dari konstruksi kognitif atas realitas melalui aktivitas seseorang. Pengalaman tidak bersifat pasti atau tetap, melainkan sebuah proses menjadi tahu. Inti dari teori konstruktivisme adalah gagasan bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks ke dalam situasi lain, dan jika dikehendaki, informasi tersebut menjadi milik mereka sendiri. Dengan dasar ini, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi dan bukan menerima pengetahuan (Muhajirah, 2020). Para pengajar diharapkan dapat mempraktekkan pendekatan konstruktivis dalam kegiatan promosi mereka. Dalam kerangka ini, teori konstruktivis menyasar berbagai audiens mulai dari mahasiswa kedokteran, mahasiswa teknik, hingga mahasiswa konservatori yang ditargetkan untuk menghasilkan individu yang efisien, dapat mengatur diri sendiri, dan kompeten (Orak & Al-khresheh, 2021).

Konsep konektivisme menggambarkan hubungan antara pembelajaran manusia dan akses pengetahuan yang ada di mana-mana yang dimungkinkan oleh lingkungan teknologi saat ini (Corbett & Spinello, 2020). Konektivisme adalah pendekatan epistemologi yang didasarkan pada interaksi dalam jaringan baik dalam pikiran individu maupun di dunia luar (Boyraz & Ocak, 2021). Pada titik ini, pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang berfokus pada apa yang harus dilakukan (behaviorisme), apa yang harus dipikirkan (kognitivisme), dan bagaimana cara berpikir (konstruktivisme), dan memberikan dasar epistemologis (Barnett et al., 2013). Konektivisme juga terlihat dalam karya-karya terbaru (seperti yang ada dalam rumusan aslinya) sebagai informasi dan penjelasan proses pembelajaran. Ini adalah model pembentukan jaringan, bukan model akuisisi pengetahuan. Siswa perlu mengalami kebutuhan terus menerus untuk membuat hubungan baru, baik dengan sumber daya atau dengan orang lain (Downes et al., 2019).

Penjelasan terkait teori-teori belajar tersebut kemudian direlevansikan dengan perkembangan kurikulum di Indonesia. Adapun untuk gambarannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis kajian teori belajar berdasarkan kurikulum Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kurikulum | Proses Manajemen Pembelajaran | Teori Belajar |
| Rentjana Peladjaran 1947 | Proses yang ditujukan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Maka terdapat aturan-aturan yang harus diikuti berdasarkan ketetapan yang berlaku | Behavioristik |
| Rentjana Peladjaran Terurai 1952 | Setiap rencana pelajaran harus mempertimbangkan konten yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah menghasilkan masyarakat yang bijaksana, demokratis dan bertanggung jawab | Behavioristik |
| Rentjana Pendidikan 1964 | Pemerintah memiliki keinginan agar rakyat mendapatkan pembekalan berdasarkan Pancawardhana. Pendidikan didasarkan pada pengetahuan dan kegiatan praktis sejak dasar | Behavioristik |
| Kurikulum 1968 | Kurikulum yang bertujuan untuk membentuk manusia berdasarkan Pancasila. Memberikan otonomi yang diserahkan kepada masing-masing sekolah atau guru, namun tetap berpatokan pada tujuan materi, metode dan evaluasi yang ditetapkan oleh pusat. | Kognitivistik |
| Kurikulum 1975 | Menggunakan rincian metode, materi dan tujuan dalam PPSI. Guru harus berusaha agar tujuannya bisa tercapai | Behavioristik |
| Kurikulum 1984 | Menekankan pada pembagian wewenang pengembangan kurikulum antara pusat dan daerah. Orientasi materi pada keseimbangan kognitif, keterampilan dan sikap melalui model CBSA. | Kognitivistik |
| Kurikulum 1994 and Suplemen 1999 | Menekankan pada isi dari materi disertai muatan-muatannya. Titik sentral terpusat pada kebijakan pemerintah | Behavioristik |
| Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK) 2004 | Kegiatan belajar mengajar di kelas berfokus pada pengembangan kompetensi bagi tiap siswa. Implikasinya, akan terjadi pergeseran dari penguasaan pengetahuan (kognitif) atau dominasi kognitif menuju kepada penguasaan kompetensi tertentu. | Behavioristik |
| Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 | Menekankan pada pemberian wewenang penuh pada tiap satuan pendidikan dalam mengembangkan program pembelajarannya. Guru diminta untuk juga mengembangkan kapasitasnya secara profesional. | Konstruktivistik |
| Kurikulum 2013 (K-13) | Kurikulum yang didasarkan pada kompetensi untuk mencapai pembentukan karakter yang tidak terikat dengan mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus berkontribusi dalam pembentukan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. | Behavioristik |
| Kurikulum Merdeka | Kurikulum yang cenderung adaptif dan fleksibel dalam mempersiapkan siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan berbasis proyek. Guru harus mengembangkan kapabilitas profesional melalui program-program yang diadakan pemerintah. | Konstruktivistik |

Sumber: diolah peneliti 2023

Informasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa telah terjadi transisi penerapan teori belajar pada masing-masing kurikulum yang pernah ada. Pergeseran ke arah pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran didorong oleh pengakuan yang semakin besar akan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah, eksplorasi, dan kolaborasi, serta pemikiran kritis dan kreativitas. Memasukkan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka dan menciptakan pemahaman mereka tentang pengetahuan, yang pada gilirannya mendorong pembelajaran yang lebih dalam dan seumur hidup. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah sangat mempengaruhi cara penerapan teori-teori pembelajaran dalam pendidikan. Teknologi menyediakan alat dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran, seperti video *online*, rekaman kuliah, dan diskusi *online*, dan memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan dari lokasi mana pun dengan koneksi internet. Teknologi juga memungkinkan untuk menciptakan pengalaman belajar multi-indera, dari simulasi interaktif hingga *augmented reality*, yang memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi siswa.

**Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdaka: Merangkul Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka adalah dua reformasi pendidikan yang signifikan yang diterapkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kurikulum 2013 bertujuan untuk merevolusi sistem pendidikan di Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi dan mendorong kemampuan berpikir kritis di kalangan siswa. Kurikulum ini menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa dan berfokus pada integrasi berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka berusaha untuk mempromosikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pendidikan, yang memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran mereka sendiri dan menentukan jalur pembelajaran mereka.

Sebagaimana yang kita pahami, tujuan pembangunan berkelanjutan butir 4 adalah *quality of education.* Pada tahun 2030, sangat penting untuk menjamin bahwa semua individu yang terlibat dalam proses pembelajaran memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk secara aktif berkontribusi pada kemajuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penggabungan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, promosi hak asasi manusia dan kesetaraan gender, pengembangan budaya perdamaian dan anti-kekerasan, pembinaan kewarganegaraan global, dan pengakuan nilai keanekaragaman budaya dan perannya dalam pembangunan berkelanjutan (Council of Europe, 2023). Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global dapat membantu mencegah kekerasan, rasisme, ekstremisme, xenofobia, diskriminasi, dan intoleransi dengan mempromosikan budaya perdamaian, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Pendidikan ini juga dapat membantu individu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan, serta bekerja menuju dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

SDG 4 memiliki akar yang kuat dalam berbagai deklarasi internasional, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia", "Milenium tentang Hak Anak", "Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua", "Kerangka Kerja Dakar untuk Aksi", dan "Tujuan Pembangunan Milenium", sehingga menganggap pendidikan sangat penting bagi kesejahteraan individu, bangsa, dan dunia (Mohanty, 2018). Pendidikan adalah cara mendasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ruang kelas adalah tempat di mana guru dapat mempromosikan dan menanamkan nilai-nilai dan perubahan sikap yang memungkinkan SDGs mencapai tujuannya (Mahboobeh et al., 2023). Oleh karena itu, mudah untuk memahami bahwa SDG 4, "Pendidikan Berkualitas", merupakan aspek fundamental untuk mencapai, memperluas, dan secara efektif mengimplementasikan SDG lainnya (Velázquez & Rivas, 2020).

Kurikulum 2013 memberikan penekanan yang kuat dalam mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlun untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Hasil penelitian Hidayah & Yuliawati (2021)menunjukkan bahwa ranah kognitif pada kurikulum 2013 bertansformasi sehingga memiliki kesesuaian dengan aspek pengetahuan dan pemahaman pada kurikulum SDGs. Sementara itu, ranah psikomotor juga memiliki kesesuaian dengan aspek keteramplan serta aplikasi dan ranah afektif memiliki kesesuaian dengan aspek nilai dan sikap.

Dalam mencapai SDG, pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan global. Kurikulum Merdeka dicirikan oleh sifatnya yang inovatif dan mudah beradaptasi, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang lebih personal dan bermakna bagi para siswa. Sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Kurikulum Merdeka mencakup penggabungan prinsip dan nilai SDG ke dalam kurikulum pendidikan. Integrasi ini melibatkan pemberian pengetahuan tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, mendorong pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pencapaian SDG, dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan dari tindakan individu dan kolektif. Ini terbukti dari penelitian Purnomo (2023) bahwa Kurikulum Merdeka mampu memberikan pembelajaran bersistem yang memahami materi secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kesimpulannya, teori belajar behavioristik sangat mendominasi perjalanan kurikulum di Indonesia. Kemudian disusul oleh teori belajar kognitivistik dan konstruktivistik. Ketiga teori belajar ini selalu bertransisi mengiringi setiap perubahan kurikulum yang terjadi. Reformasi kurikulum telah bergeser dari pendekatan tradisional yang berfokus pada konten ke pendekatan yang lebih fleksibel dan menarik yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Para guru didorong untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran, termasuk pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek, untuk membantu para siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Fokusnya tidak lagi pada apa yang diketahui siswa, tetapi pada apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui. Reformasi kurikulum juga disertai dengan perubahan dalam praktik penilaian. Tes standar telah dilengkapi dengan tugas-tugas penilaian otentik yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pembelajaran mereka dalam situasi kehidupan nyata.

Paparan di atas sesuai dengan landasan *sustainable development goals* butir ke 4 tentang quality of education Pada tahun 2030, upaya untuk meraih masa depan yang lebih cerah akan bergantung pada transformasi pendidikan, memberdayakan setiap individu untuk menjadi katalisator bagi kemajuan masyarakat. Konstruksi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang berkembang di Indonesia menunjukkan determinasinya dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, artikel ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi dalam melihat peluang tersebut terkait manajemen kurikulum yang berkembang.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, A. (2007). Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah (Suatu Tinjauan Kritis Filosofis). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *066*, 340–361.

Abidin, D., Retnaningrum, E., Parinussa, J. D., & Kuning, D. S. (2023). Curriculum Development in Indonesia from a Historical Perspective. *Journal of Education Research*, *4*(2), 443–451.

Abramova, L. . (2019). *The development of science and education*. Publishing House “Sreda.”

Agung, L., & Noviastuti, L. (2015). *Sejarah Kurikulum Sekolah Menengah di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Ombak.

Alhamuddin. (2014). SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA. *Nur El-Islam*, *1*(2), 48–58.

Alhamuddin. (2019). *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia: Sejak Zaman Kemerdekaan hingga Reformasi (1947-2013)*. Kencana.

Ananda, A. P., & Hudaidah. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, *3*(2), 102–108.

Angga, Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *6*(4), 5877–5889.

Antoniou, P., & Lu, M. (2018). Evaluating the measuring properties of the principal instructional management rating scale in the Chinese educational system : Implications for measuring school leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, *46*(4), 624–641. https://doi.org/10.1177/1741143217700282

Araiba, S. (2020). Current Diversification of Behaviorism. *ABAI: Perspectives on Behavior Science*, *43*, 157–175.

Arifin. (2009). *Problematika SDM Guru Dalam Penerapan KTSP (Sebuah Renungan mencari jalan keluar)*. Wordpress. https://drarifin.wordpress.com/2009/09/16/27/

Asman, Y. . (2003). *Kecerdasan Pelaksanaan KBK*. http://www.raiaraia.com/news.detail. php?id=news=402

Asri, M. (2017). DINAMIKA KURIKULUM DI INDONESIA. *MODELING*, *4*(2), 192–202.

Bandura, A. (2001). *SOCIAL COGNITIVE THEORY.* 1–26.

Barnett, J., Mcpherson, V., & Sandieson, R. M. (2013). ascilite Connected teaching and learning : The uses and implications of connectivism in an online class. *Australasian Journal of Educational Technology*, *29*(5), 685–698.

Boyraz, S., & Ocak, G. (2021). Connectivism : A Literature Review for the New Pathway of Pandemic Driven Education. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, *6*(3), 1122–1129.

Budiono, E., & Susanto, H. (2006). KOMPETENSI SUB POKOK BAHASAN ANALISA UNTUK SOAL-SOAL DINAMIKA. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, *4*(2), 79–87.

Chairani, N. (2015). 2013 Curriculum Reflected in an International Oriented Senior High School, Yogyakarta. *David Publishing*, *12*(8), 568–574. https://doi.org/10.17265/1539-8072/2015.08.004

Corbett, F., & Spinello, E. (2020). Heliyon Connectivism and leadership : harnessing a learning theory for the digital age to rede fi ne leadership in the twenty- first century. *Heliyon*, *6*(January), e03250. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03250

Council of Europe. (2023). *Education for sustainable development and global citizenship. Education.* https://www.coe.int/en/web/education/4.7-education-for-sustainable-development-and-global-citizenship

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Metode Khusus Pengembangan Kemampuan Pendidikan Dan Kebudayaan.* Depdikbud.

Depdiknas. (2001). *Sekilas informasi Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis (PPPG Tertulis).* Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis.

Depdiknas. (2003). *Kurikulum berbasis kompetensi*. Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan, dan K.-K. (1968). *Rencana Pendidikan dan Pelajaran SMA*. Kementerian Pendidikan.

Downes, S., Canada, C., & Road, M. (2019). *Recent work in connectivism*. *22*(2). https://doi.org/10.2478/eurodl-2019-0014

Ekawati, Y. N. (2017). ENGLISH TEACHERS ’ PROBLEMS IN APPLYING THE CURRICULUM 2013. *ENGLISH REVIEW: Journal of English Education*, *6*(1), 41–48. https://doi.org/10.25134/erjee.v6i1.769.Received

Fitriyah, C. Z., & Wardani, R. P. (2022). Paradigma Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *12*(3), 236–243.

Gould, J. (2012). *Learning Theory and Classroom Practice in the Lifelong Learning Sector*. Sage.

Gunawan, I. (2017a). *Indonesian Curriculum 2013 : Instructional Management , Obstacles Faced by Teachers in Implementation and the Way Forward*. *128*(Icet), 56–63.

Gunawan, I. (2017b). INSTRUCTIONAL MANAGEMENT IN INDONESIA : A CASE STUDY. *Journal of Arts, Science & Commerce*, *8*(3), 18843.

Hadi, A., Ngindana, R., Kurdi, M. S., & Sulaiman, M. (2023). New Paradigm of Merdeka Belajar Curriculum in Schools. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, *15*(2), 1497–1510. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3126

Hakim, L. (2017). ANALISIS PERBEDAAN ANTARA KURIKULUM KTSP DAN KURIKULUM 2013. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, *17*(2), 280–292. https://doi.org/10.22373/jid.v16i1.590.5

Hallinger, P., Dongyu, L., & Wang, W. (2016). *Gender Differences in Instructional Leadership : A Meta-Analytic Review of Studies Using the Principal Instructional Management Rating Scale*. https://doi.org/10.1177/0013161X16638430

Hamalik, O. (1995). *Kurikulum dan pembelajaran.* Bumi Aksara.

Harahap, N. (1979). *Teknik Penilaian Hasil Belajar*. Bulan Bintang.

Hidayah, V. N., & Yuliawati, F. (2021). KURIKULUM TEMATIK 2013 DALAM FRAMEWORK. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, *13*(2), 162–171.

Hidayat, R., Siswanto, A., & Bangun, B. N. (2017). *Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia*. Labaos.

Hirsch, S. E., Mcdaniel, S. C., Salle, T. La, & Walker, A. C. (2021). Instructional Management for Students With Emotional and Behavioral Disorders in Remote Learning Environments. *Intervention in School and Clinic*, *57*(2), 78–86. https://doi.org/10.1177/10534512211001825

Insani, F. D. (2019). SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI. *As-Salam*, *8*(1), 43–64.

Iramdan, & Manurung, L. (2019). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *5*(2), 88–95. https://doi.org/10.5281/zenodo.2678137

Izmi, A. (2017). *POLITIK KURIKULUM DI INDONESIA : Stusi Tentang Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968*. Universitas Negeri Jakarta.

Jannah, M., & Laili, M. I. (2018). KURIKULUM 1984/CBSA DALAM PENGEMBAHAN MATERI BAHASA ARAB. *INTAJUNA: Jurnal Hasil Penelitian*, *1*(2), 35–40.

Karwapi. (1971). *Guru Sekolah Dasar: Beberapa Masalah dan Pendekatannja*. HASMAR.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *MATERI PELATIHAN GURU IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013: SMP / MTs*.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2021). *Risalah Kebijakan: Dampak Penyederhanaan Kurikulum terhadap Capaian Pembelajaran*. *November*.

Kohler, W. (1960). *Dynamics in Psychology.* Grove Press.

Kohler, W. (2018). *The Mentality of Apes*. Routledge.

Kosassy, S. O. (2017). ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013. *Jurnal PPKn & Hukum*, *12*(1), 78–89.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.

Kwartolo, Y. (1994). Catatan Kritis tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Jurnal Pendidikan Penabur*, *1*(01), 106–116.

Lederman, N. G., Lederman, J. S., Nature, A., Lederman, N. G., Lederman, J. S., & Antink, A. (2013). International Journal of Education in Mathematics , Science and Technology ( IJEMST ) Nature of Science and Scientific Inquiry as Contexts for the Learning of Science and Achievement of Scientific Literacy Nature of Science and Scientific Inquiry as Conte. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST)*, *1*(3), 138–147.

Lee, M., Hallinger, P., & Walker, A. (2012). Perspective on Instructional Leadership in International Baccalaureate ( IB ) Schools. *Educational Administration Quarterly*, *48*(4), 664–698. https://doi.org/10.1177/0013161X11436271

Lestari, N. A. P. (2023). Analysis of 2013 curriculum problems so it is changed into a merdeka curriculum. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, *8*(2), 263–274.

Mahboobeh, S., Nader, J., Ebrahim, A., & Jamali, F. (2023). The role of STEM Education in improving the quality of education : a bibliometric study. *International Journal of Technology and Design Education*, 819–840.

Marks, H. M., & Printy, S. M. (2003). *Principal Leadership and School Performance : An Integration of Transformational and Instructional Leadership*. 370–397. https://doi.org/10.1177/0013161X03253412

Maslow, A. (2013). *Toward a Psychology of Being*. Simon and Schuster.

Michela, A. (2022). *Cognitivism*. Education Research.

Mohanty, A. (2018). Education for sustainable development : A conceptual model of sustainable education for India. *International Journal of Development and Sustainability*, *7*(9), 2242–2255.

Muhajirah. (2020). Basic Of Learning Theory (Behaviorism, Cognitivism, Constructivism, and Humanism). *International Journal of Asian Education*, *1*(1), 37–42.

Muhammedi. (2016). Perubahan kurikulum di Indonesia: studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, *4*(1), 49–70.

Mukminin, A., Habibi, A., & Prasojo, L. D. (2019). *Curriculum Reform in Indonesia : Moving from an Exclusive to Inclusive Curriculum Kurikularna prenova v Indoneziji : prehod od izključujočega k vključujočemu kurikulumu*. *9*, 53–72. https://doi.org/10.26529/cepsj.543

Mulyanie, S., & Susilowati. (2006). Persepsi Guru Pengetahuan Alam/Biologi Smpn di Kecamatan Sukoharjo terhadap Kurikulum 2004 (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo. *BIOEDUKASI*, *3*(1), 1–6.

Murphy, J., Neumerski, C. M., Goldring, E., Grissom, J., & Porter, A. (2016). Bottling fog? The quest for instructional management. *Cambridge Journal of Education*, *46*(4), 455–471.

Nasution, S. (1999). *Asas-Asas Kurikulum*. Bumi Aksara.

Nurhalim, M. (2011). Analisis Perkembangan Kurikulum di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain dan Pendekatan). *INSANIA*, *16*(3), 339–356.

Orak, S. D., & Al-khresheh, M. H. (2021). In Between 21st Century Skills and Constructivism in ELT : Designing a Model In Between 21st Century Skills and Constructivism in ELT : Designing a Model Derived From a Narrative Literature Review. *World Journal of English Language*, *11*(2), 166–176. https://doi.org/10.5430/wjel.v11n2p166

Palupi, D. T. (2018). Indonesian Journal of Curriculum What Type of Curriculum Development Models Do We Follow ? An Indonesia ’ s 2013 Curriculum Case. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, *6*(4), 98–105.

Pavlov. (1932). *The psychological review*. *39*(2), 412–428.

Pawero, A. M. V. D. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK , KTSP , dan K-13 Pendahuluan. *Jurnal Ilmiah Iqra’*, *12*(1), 42–59.

Piaget, J. (1988). *Psychologie et pédagogie.* FOLIO ESSAIS.

Prastyo, G. W. (2013). *Manajemen kurikulum berbasis informatika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sandhy Putra Malang*. Universitas Negeri Malang.

Priantini, D. A. M. M. O., Suarai, N. K., & Adnyana, I. K. S. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar untuk Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas. *JURNAL PENJAMINAN MUTU*, *8*(2), 238–244.

Purnomo, A. R. (2023). Embedding Sustainable Development Goals to Support Curriculum Merdeka Using Projects in Biotechnology. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, *22*(1), 406–433.

Purnomo, E., & Munadi, S. (2015). Evaluasi Hasil Belajar dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Kejuruan. *Cakrawala Pendidikan*, *24*(2), 259–272.

Purswell, K. E. (2019). *Humanistic Learning Theory in Counselor Education*. *9*(4), 358–368. https://doi.org/10.15241/kep.9.4.358

Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif*, *15*(1), 63–82.

Restu, R., Sriadhi, S., Gultom, S., & Ampera, D. (2022). Implementation Of The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Curriculum Based On The RI 4 . 0 Platform At Universitas Negeri Medan. *Journal of Positive School Psychology*, *6*(6), 10161–10176.

Rizaldi, D. R., & Fatimah, Z. (2022). Merdeka Curriculum: Characteristics and Potential in Education Recovery after the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Curriculum and Instruction*, *15*(1), 260–271.

Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). *The Impact of Leadership on Student Outcomes : An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types*. *44*(5), 635–674. https://doi.org/10.1177/0013161X08321509

Sadirman, & Yuliantri, R. D. A. (2012). *Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde Baru (Kebijakan Daoed Joseof dan Nugroho Notosusanto)* (Issue April).

Siemens, G. (2017). *Connectivism. Dalam Foundations of Learning and Instructional Design Technology*. EdTech Books.

Sinambela, P. (2013). *Kurikulum 2013 , Guru , Siswa , Afektif , Psikomotorik , Kognitif*. 17–29.

Sjamsuddin, H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan* (p. 220). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Skinner, B. (1957). *Verbal behavior*. Appleton-Century-Crofts.

Soedjiarto, Thamrin, Karyadi, B., Siskandar, & Sumiyati. (2010). *Sejarah pusat kurikulum*.

Suparlan, N. (2020). *Tanya jawab pengembangan kurikulum & materi pembelajaran*. Bumi Aksara.

Surachmad. (1977). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Untuk SPG.* Depdikbud: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajarlajar*, 13–28.

Thorndike, E. L. (1911). *Animal Intelligence: Experimental Studies*. Transaction Publishers. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781351321044

Tilaar, H. A. . (1995). *50 tahun pembangunan pendidikan nasional, 1945-1995: Suatu analisis kebijakan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tolstova, O., & Levasheva, Y. (2019). *Humanistic trend in education in a global context*. *00121*, 1–5.

Tolvanen, S., Jansson, J., & Maija, V. V. (2013). How to Use Historical Approach to Teach Nature of Science in Chemistry Education ? *Teach Nature of Science in Chemistry Education Their*. https://doi.org/10.1007/s11191-013-9646-x

Velázquez, F. D. C., & Rivas, F. L. (2020). *Education for Sustainable Development in STEM ( Technical Drawing ): Learning Approach and Method for SDG 11 in Classrooms*.

Vivekanantharasa, R., Saidek, A. R., & Setiawan, H. (2022). Curriculum for Elementary Schools in The Merdeka Curriculum. *EJIP: Educational Journal of Innovation and Publication*, *1*(2), 82–89. https://doi.org/10.24036/XXXXXXXXXX-X-XX

Vygotsky, L. . (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. In *M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman,*. University Press.

Wahyudin, D. (2020). *Politik Kurikulum*. PT. Remaja Rosdakarya.

Wahyudin, Din, & Suwirta, A. (2017). The Curriculum Implementation for Cross-Cultural and Global Citizenship Education in Indonesia Schools. *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, *10*(August), 11–22.

Wahyuni, F. (2015). KURIKULUM DARI MASA KE MASA ( Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia ). *Al-Adabiya*, *10*(2).

Wahyuni, S. (2003). CURRICULUM DEVELOPMENT IN INDONESIAN CONTEXT. *Universum*, *10*(1), 73–82.

Wardana, E. (2003). *Menimbang Pendidikan Berbasis Kompetensi*. Artikel.

Wardhana, I. P. (2021). Review Kurikulum Pendidikan Cara Belajar Siswa Aktif ( CBSA ) Tahun 1984 Dalam Pendidikan Indonesia. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, *3*(1), 17–26.

Warman, Suryaningsi, & Mulawarman, W. G. (2021). Overcoming obstacles in implementing 2013 curriculum policy. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, *16*(3), 967–980.

Watson, B. Y. J. B. (1913). *Psychology as the behaviorist views it*.

Wirianto, D. (2014). Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia. *Islamic Studies Journal*, *2*(1), 133–147.

Ziafar, M., & Namaziandost, E. (2019). From Behaviorism to New Behaviorism: A Review Study. *Loquen: English Studies Journal*.